

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adisapoetra, R. Kosim, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983).
- Agusnawar, *Operasional tata Graha Hotel: Hotel Housekeeping Operational*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).
- Alwasilah, A. Chaedar, *Pokoknya Kualitatif*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya dengan Pusat Studi Sunda, 2002).
- Atmostidirjo, S.Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995).
- Bakhri, Syaiful, *Ilmu Negara dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah, dan Negara Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1981).
- Chaidir, Ellydar, *Hukum dan Teori Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2007).
- Efendi, Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2005).
- Efriza, *Ilmu Politik: dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Hadjon, Philipus M., dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press Uiversity, 2002).
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Hasni. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2006).
- Jurdi, Fajlurrahman, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016).
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi ke-5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

- Malian, Sobirin, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2000).
- Marbun, S.F., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997).
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).
- Pudyatmoko, Y.Sri. *Perizinan, Problem dan upaya Pembenahan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2009).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Riyanto, Astim, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Yapemdo, 2006).
- Rusadi, Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke- 3, (Jakarta: UI Press, 1986).
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-7. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003).
- Spelt, N. M, dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon*, (Surabaya : Yuridika, 1993).
- Wicaksono, Teguh. *Konsep Pembangunan Perkotaan Indonesia*, (Jakarta: LP3IS, 2005).
- Wignjosuebrototo, Soetandyo, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian Sosial dan Hukum*, (Malang: Setara Press, 2017).

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

- Indonesia. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016)*.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2016 tentang *Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276)*.

- \_\_\_\_\_. PP RI No. 36 Tahun 2005 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532)*.
- \_\_\_\_\_. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)*.
- \_\_\_\_\_. Undang – Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)*.
- \_\_\_\_\_. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Perencanaan Ruang (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)*.

### C. Artikel, Jurnal, Makalah, Kamus

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jakarta. Lampiran.
- Hadjon, Philipus M. dalam Sukardi, “Wewenang Pembatalan Peraturan Daerah”, *Jurnal Law Review*, Volume XII No. 3, Tahun 2013.
- Hakim, Lukman, “Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 4 No. 1, Juni 2011.
- Jeprisen, “Studi Tentang Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Kutai Barat”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, 2016.
- Madya, Faizal, “Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Bogor”, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 4 nomor 2, September 2008.
- Mustaghfiri, Mohammad Haidar, Priyanto Susiloadi, “Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal

- dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta”, *Jurnal Wacana Publik*, Volume 1 No. 2, 2017.
- Prasetyo, Teguh, “*Rule Of Law* Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Edisi Oktober, 2010.
- Ridlwani, Zulkarnain, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 2, Mei-Agustus 2012.
- Simamora, Janpatar, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 No. 3, September 2014.
- Syafrudin, Ateng, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, 2000.
- Urmilasari, Evy et al., “Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, Januari 2013.